

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025 ini dapat disusun dengan baik..

Renja Perubahan ini merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2025. Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk menyesuaikan program, kegiatan, dan pagu anggaran dengan dinamika perkembangan kebijakan nasional dan daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan program pada tahun berjalan.

Dokumen Renja Perubahan ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, khususnya dalam bidang penguatan Ideologi Pancasila, peningkatan partisipasi politik, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, serta peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Kota Balikpapan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik berupa masukan, data, maupun dukungan teknis, sehingga penyusunan Renja Perubahan ini dapat terlaksana dengan lancar. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam rangka mewujudkan Kota Balikpapan yang aman, tertib, demokratis, dan berdaya saing tinggi.

Balikpapan, 11 Agustus 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Balikpapan

 SUTADI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 LATAR BELAKANG.....	3
1.2 LANDASAN HUKUM.....	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KERJA TAHUN BERJALAN.....	8
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025	8
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	34
2.3 ISI-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ...	37
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....	45
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	48
3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	48
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....	49
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN.....	51
BAB IV PENUTUP.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang memuat penyesuaian terhadap target kinerja, program, kegiatan, serta pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Renja murni, sejalan dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Penyusunan Renja Perubahan ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

- 1) Penyesuaian terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Daerah
Perubahan arah kebijakan pembangunan nasional maupun daerah, termasuk penyesuaian terhadap kebijakan strategis Pemerintah Pusat, memerlukan sinkronisasi pada tingkat perangkat daerah agar program dan kegiatan tetap relevan, terarah, dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan;
- 2) Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun Berjalan
Evaluasi atas realisasi program dan kegiatan pada triwulan berjalan menunjukkan adanya perbedaan capaian kinerja, perubahan kebutuhan di lapangan, dan dinamika lingkungan strategis yang mengharuskan dilakukan penyesuaian perencanaan;
- 3) Perubahan Pagu Anggaran dan Efisiensi Belanja Daerah
Penyesuaian alokasi anggaran pada APBD Perubahan 2025 berdampak pada perubahan besaran pagu indikatif masing-masing program dan kegiatan di lingkungan Badan Kesbangpol. Perubahan ini perlu dituangkan secara formal dalam Renja Perubahan sebagai dasar pelaksanaan dan penganggaran;
- 4) Dinamika Kondisi Sosial, Politik, dan Keamanan
Perkembangan situasi politik, kehidupan demokrasi, kerukunan umat beragama, ketahanan ekonomi-sosial-budaya, serta kewaspadaan

nasional di Kota Balikpapan memerlukan respon kebijakan dan langkah antisipatif yang lebih adaptif.

Dengan demikian, penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan prioritas pembangunan daerah yang telah disempurnakan, realistis dari sisi pembiayaan, dan responsif terhadap tantangan serta kebutuhan aktual masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang mendasari dan menjadi referensi dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Daerah Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 mengenai Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2014;
10. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyesuaikan perencanaan kerja tahunan perangkat daerah dengan kebijakan pembangunan daerah, prioritas nasional, serta kondisi aktual yang terjadi pada tahun berjalan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan ini adalah:

- 1) Menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun Anggaran 2025 setelah adanya perubahan kebijakan, prioritas, dan alokasi anggaran;
- 2) Menjamin konsistensi antara dokumen perencanaan tahunan (Renja Perubahan) dengan dokumen perencanaan daerah lainnya, khususnya RKPD Perubahan Tahun 2025 dan Renstra Perangkat Daerah;
- 3) Mengakomodasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, perkembangan situasi dan kondisi daerah, serta masukan dari pemangku kepentingan;
- 4) Menyediakan acuan bagi pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

I.1 Latar Belakang :

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

I.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berjalan dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008;

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

2.4. Review Terhadap RKPD Perubahan tahun 2025

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan, Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis

program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33,

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Walikota Balikpapan terpilih periode 2021-2026 telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Visi RPJMD Kota Balikpapan periode 2021-2026, yaitu dengan VISI “**TERWUJUDNYA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, MODERN, DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI MADINATUL** “ dan Misi sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik

Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi

Misi 3 : Menyediakan Infrastruktur Kota Yang Memadai

Misi 4 : Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan

Misi 5 : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Kreatif

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan pada tahun 2025 maka melaksanakan 2 (dua) urusan, 6 (Enam) program dan 11 (Sebelas) Kegiatan dan 45 (Empat Puluh Lima) Sub Kegiatan dengan total pagu Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 36.501.090.507,-** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Periode (%)			
								I		II										
2	3	4	5		6		7		8		9		12		13		14		15	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Meningkatnya Pembangunan Demokrasi dan Politik di Daerah	Persentase Partisipasi Lembaga Politik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat	%	67		100		67		0		0		0		0		100		149.25	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	%	320	15.566.404.700	280	8.654.905.404	66	8.252.635.100	0	756.660.700	55	1.436.152.600	55	2.192.813.300	83.33	26.57	335	10.847.718.704	104.69	69.69
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional	%	500	15.566.404.700	321	8.654.905.404	100	8.252.635.100	0	756.660.700	55	1.436.152.600	55	2.192.813.300	55	26.57	376	10.847.718.704	75.2	69.69
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	dokumen					1	25.012.000	1	6.907.500		-	1	6.907.500	100	27.62				
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen					1	1.125.000.000	0	700.000.000	1	-	1	700.000.000	100	62.22				

Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Periode (%)	
									I		II									
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang					43	1.180.000.000	0	3.081.000	0	1.721.500	0	4.802.500	0	0.41				
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang					300	500.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0				
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan					4	120.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0				
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Orang					2050	1.707.050.000	0	-	2050	1.180.350.000	2050	1.180.350.000	100	69.15				
Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang					43	3.089.803.200	0	33.400.000	43	240.472.800	43	273.872.800	100	8.86				
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	dokumen					1	505.769.900	0	13.272.200	1	13.608.300	1	26.880.500	100	5.31				

Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Periode (%)	
									I		II									
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	%	466.6	25.243.238.580	266	93.170.970.362	100	5.397.638.320	0	10.541.100	25	721.170.887	25	731.711.987	25	13.56	291	93.902.682.349	62.37	371.99
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik yang diberikan	%	500	25.243.238.580	300	93.170.970.362	100	5.397.638.320	0	10.541.100	25	721.170.887	25	731.711.987	25	13.56	325	93.902.682.349	65	371.99
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daer	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Da	dokumen					1	25.109.258	0	-	1	3.250.000	1	3.250.000	100	12.94				
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	dokumen					1	3.179.487.482	0	-	0	-	0	-	0	0				

Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Periode (%)	
									I		II									
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Polit	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Dae																			
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Peman	Orang					50	477.457.440	0	-	0	-	0	0	0	0				
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Orang					150	261.100.000	0	3.035.000	0	51.593.025	0	54.628.025	0	20.92				
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Pemilihan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	Laporan					1	1.454.484.140	0	7.506.100	0	666.327.862	0	673.833.962	0	46.33				

Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Periode (%)	
									I		II									
Umum Kepala Daerah, serta Pemantaua	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta																			
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan	%	430	3.885.776.280	287	3.836.371.888	89	1.563.561.680	0	8.408.100	50	13.555.150	50	21.963.250	56.18	1.4	337	3.858.335.138	78.37	99.29
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase perwakilan ormas yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan ormas	%	500	3.885.776.280	300	3.836.371.888	100	1.563.561.680	0	8.408.100	50	13.555.150	50	21.963.250	50	1.4	350	3.858.335.138	70	99.29
Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	dokumen					1	14.800.000	0	-	1	3.250.000	1	3.250.000	100	21.96				
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	dokumen					1	214.800.000	0	-	0	-	0	0	0	0				
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	Orang					300	922.809.760	0	-	0	-	0	0	0	0				

Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Periode (%)	
									I		II									
Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																			
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang					150	223.468.720	0	902.000	0	2.631.000	0	3.533.000	0	1.58				
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan					1	187.683.200	0	7.506.100	1	7.674.150	1	15.180.250	100	8.09				
Meningkatnya Pencegahan Konflik Sosial di Kota Balikpapan	Persentase konflik sosial yang ditindaklanjuti	%	89		100		89		0		0		0		0		100		112.36	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pemuda yang Mengikuti Sosialisasi Konsep P4GN	%	451	5.246.006.100	270	8.300.054.114	95	2.430.000.000	0	-		787.680.000	0	787.680.000	0	32.41	270	9.087.734.114	59.87	173.23
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase penyelenggaraan sosialisasi konsep P4GN	%	500	5.246.006.100	300	8.300.054.114	100	2.430.000.000	0	-		787.680.000	0	787.680.000	0	32.41	300	9.087.734.114	60	173.23
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	dokumen					1	50.000.000	0	-		4.080.000	0	4.080.000	0	8.16				

Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Periode (%)	
									I		II									
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen					1	1.000.000.000	0	-		783.600.000	0	783.600.000	0	78.36				
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang					400	470.000.000	0	-	0	-	0	0	0	0				
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang					300	550.000.000	0	-	0	-	0	0	0	0				
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	Laporan					48	360.000.000	12	-	12	-	24	0	50	0				

Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Periode (%)	
									I		II									
Kepercayaan di Daerah	Penghayat Kepercayaan di Daerah																			
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik yang telah Dilakukan Monitoring	%	428	25.969.033.100	265	34.963.726.451	88	6.599.000.000	19	975.195.629	50	784.161.000	69	1.759.356.629	78.41	26.66	334	36.723.083.080	78.04	141.41
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase sosialisasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana	%	500	25.969.033.100	300	34.963.726.451	100	6.599.000.000	0	975.195.629	15	784.161.000	15	1.759.356.629	15	26.66	315	36.723.083.080	63	141.41
Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daera	Dokumen					1	50.000.000	0	3.100.000	1	10.500.000	1	13.600.000	100	27.2				
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disus	Dokumen					1	2.650.000.000	1	529.464.629		483.890.000	1	1.013.354.629	100	38.24				

Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Periode (%)	
									I		II									
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang					40	1.450.000.000	0	-	34	1.771.000	34	1.771.000	85	0.12				
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang					40	349.500.000	0	2.631.000	20	-	20	2.631.000	50	0.75				
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta P	Laporan					36	349.500.000	9	-	20	40.000.000	29	40.000.000	80.56	11.44				
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen					36	1.750.000.000	9	440.000.000	11	248.000.000	20	688.000.000	55.56	39.31				

Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Periode (%)	
									I		II									
Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	30		0		29		0		0		0		0		0		0	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	88	30.878.742.387	80,2	18.886.020.037	86	10.463.967.663	0	1516010633.27		1.604.613.054	0	3120623687.27	0	29.82	80	22006643724.27	90.91	71.27
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	70	13.740.000	64.92	0	68	9.990.000	0	-	0	-	0	0	0	0	64.92	0	92.74	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					2	9.990.000	0	-	1	-	1	0	50	0				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	82	18.433.660.500	79.3	11.172.991.268	81	6.310.335.756	0	1.228.242.588	77,64	1.288.260.091	77	2.516.502.679	95.06	39.88	77	13.689.493.947	93.9	74.26
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					23	6.310.335.756	21	1.228.242.588	24	1.288.260.091	24	2.516.502.679	104.35	39.88				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin	82	411.584.100	80.4	235.185.850	81	49.784.100	0	-	76,78	-	76	0	93.83	0	76	235.185.850	92.68	57.14
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket					2	49.784.100	0	-		-	0	0	0	0				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	82	4.552.955.303	79.7	3.238.762.681	81	1.378.652.461	0	63.538.530	75,56	38.931.480	75	102.470.010	92.59	7.43	75	3.341.232.691	91.46	73.39
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					8	252.960.751	0	-	6	-	6	0	75	0				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					11	585.287.825	4	-	4	24.254.900	8	24.254.900	72.73	4.14				
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					1	59.983.485	1	-	0	-	0	0	0	0				
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					50	12.538.500	12	-	368	-	380	0	760	0				

Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Periode (%)	
									I		II									
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					30	402.750.000	4	63.538.530	4	10.515.580	8	74.054.110	26.67	18.39				
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					20	65.131.900	0	-	0	4.161.000	0	4.161.000	0	6.39				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Poin	81	1.396.091.800	80.2	692.193.444	81	156.000.000	0	24548727.27	75,05	23.297.454	75	47.846.181	92.59	30.67	75	740.039.625	92.59	53.01
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					1	156.000.000	1	24548727.27		23.297.454	1	47.846.181	100	30.67				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	82	2.716.494.874	79.3	1.555.751.838	82	1.253.464.336	0	142.618.802	76,61	133.881.796	76	276.500.598	92.68	22.06	76	1.832.252.436	92.68	67.45
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					36	254.357.636	9	31.146.157	9	29.467.211	18	60.613.368	50	23.83				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					5	999.106.700	4	111.472.645	1	104.414.585	5	215.887.230	100	21.61				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	81	3.354.215.810	81.1	1.991.134.956	81	1.305.741.010	0	57.061.986	75,05	120.242.233	75	177.304.219	92.59	13.58	75	2.168.439.175	92.59	64.65
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					21	565.889.150	21	57.061.986	21	36.032.083	21	93.094.069	100	16.45				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					68	365.256.860	13	-	13	2.752.800	26	2.752.800	38.24	0.75				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	298.602.000	0	-	1	81.457.350	1	81.457.350	100	27.28				

Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Periode (%)	
									I		II									
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	75.993.000	0	-	0	-	0	0	0	0				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															61	16			51,77	89,14
Predikat Kinerja															Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN															64	15				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN															Rendah	Sangat Rendah				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN															59	18			74,74	131,11
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN															Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															40	22			80,56	136,3
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Tinggi

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk dapat melakukan analisis kinerja pelayanan perangkat daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan maka perlu disajikan dalam bentuk format sebagai berikut :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi capaian Tahun Ke-					Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan		60	63	65	68	70	60,46	63,92	65,96			
2.	Presentase Partisipasi Lembaga Politik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat		67%	80%	100%	67%	67%	67%	80%	100%			
3.	Presetase Konflik Sosial Yang Tertangani		80%	83%	88%	88%	89%	81%	85%	85%			

Dari capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 4 tahun yaitu tahun 2022 sampai dengan 2025 dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja yang tertuang dalam dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan tahun 2025-2029 dapat terlihat bahwa tingkat capaian untuk indikator kinerja utama sebagai berikut:

- 1) Nilai SAKIP yang diperoleh selama tahun 2025-2029 telah mencapai target, adapun nilai yang sudah mencapai target tersebut perlu dilakukan peningkatan pada capaian periode berikutnya untuk mendapatkan kategori BB (sangat baik) sehingga perlu dilakukan tindak lanjut terhadap saran dan rekomendasi yang diberikan oleh tim reviu AKIP untuk meningkatkan nilai AKIP yang diperoleh di periode mendatang;
- 2) Indikator kedua telah memiliki capaian kinerja yang mencapai target kinerja pada tahun 2024, diharapkan target tersebut dapat dipertahankan pada

tahun 2025 dengan melakukan monitoring dan evaluasi kepada partai politik untuk meningkatkan kepatuhan dan partisipasi partai politik penerima bantuan keuangan dalam melaksanakan kewajibannya menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat;

- 3) Indikator ketiga pada tahun 2024 telah mencapai target kinerja yang diharapkan. Langkah yang dilakukan pada periode selanjutnya adalah meningkatkan responsivitas dan efektivitas Badan Kesbangpol dalam menjalankan fungsi pencegahan dan penanganan konflik sosial.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

A. Berdasarkan Perwali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik memiliki fungsi dan tugas yaitu

Bagian Kesatu Kepala Badan Kepala Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah. Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;

Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan, pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian:

- a. penyusunan program;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. kepegawaian;
- d. rumah tangga kantor;
- e. perlengkapan;
- f. protokol;
- g. hubungan masyarakat;
- h. layanan informasi dan pengaduan;
- i. pembinaan pelayanan publik;
- j. kearsipan;
- k. surat menyurat;
- l. evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
- f. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran Dinas;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. pembinaan dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan publik;
- k. pengelolaan survei kepuasan masyarakat;
- l. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- m. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi pembantu;
- n. pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi; melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (tugas merumuskan perencanaan dan mengendalikan pelaksanaan sebagian tugas Badan di bidang:

- a. ideologi;
- b. wawasan kebangsaan;
- c. bela negara;
- d. karakter bangsa;
- e. pembauran kebangsaan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. sejarah kebangsaan;
- h. ketahanan ekonomi;
- i. sosial;
- j. budaya;
- k. fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- l. fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini;
- m. fasilitasi kerjasama intelijen;
- n. fasilitasi pemantauan orang asing;
- o. fasilitasi tenaga kerja asing dan Lembaga asing;
- p. fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
- q. fasilitasi kewaspadaan perbatasan antar negara; dan
- r. fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Bidang Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi

pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah;

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang:

- a. pendidikan politik;

- b. etika budaya politik;
- c. peningkatan demokrasi;
- d. fasilitasi kelembagaan pemerintahan;
- e. fasilitasi perwakilan dan partai politik;
- f. fasilitasi pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah;
- g. fasilitasi pemantauan situasi politik;
- h. pendaftaran organisasi kemasyarakatan;
- i. pemberdayaan organisasi kemasyarakatan;
- j. evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan; dan
- k. pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing.

Bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan

dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;

- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya Subbidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud.

B. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

Masalah Pokok	Masalah	Penyebab masalah /Akar Masalah
Belum optimalnya kondusivitas daerah	Belum optimalnya pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	Pemahaman wawasan kebangsaan yang belum merata di seluruh lapisan masyarakat
	Masih adanya egosentris kesukuan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial	Adanya keberagaman sebagai dampak dari heterogenitas Kota Balikpapan
	Kebutuhan bahan pokok masih bergantung dengan daerah lain	Kota Balikpapan bukan daerah penghasil bahan pokok makanan
	Pertambahan jumlah penduduk sebagai dampak daya tarik Balikpapan sebagai kota penyangga IKN meningkatkan potensi gangguan trantibum dan potensi munculnya konflik sosial	Kota Balikpapan sebagai Kota penyangga IKN menjadi daya tarik
		Proyek-proyek strategis nasional yang ada Kota Balikpapan
	Rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu dan pilkada
		Rendahnya antusiasme masyarakat terhadap calon yang akan dipilih

Masalah Pokok	Masalah	Penyebab masalah /Akar Masalah
		Kurangnya minat perempuan dalam dunia politik
	Belum optimalnya pelaksanaan Pemilu/Pilkada yang berasaskan LUBER JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil)	Netralitas ASN
	Belum optimalnya kualitas kehidupan demokrasi	Belum optimalnya peran partai politik dalam menjalankan fungsinya
		Rendahnya partisipasi perempuan dalam legislatif untuk menyuarakan hak perempuan
		Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pendidikan politik
	Belum optimalnya sinergitas antara Organisasi Kemasyarakatan dengan Pemerintah Daerah	Rendahnya pemahaman Organisasi Kemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya
		Belum ada regulasi daerah yang mengatur tentang Organisasi Kemasyarakatan
	Adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada masyarakat	Maraknya aksi premanisme yang dilakukan Organisasi Kemasyarakatan
		Konflik kepengurusan internal organisasi
		Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan
	Belum optimalnya kualitas kehidupan demokrasi	Belum optimalnya peran partai politik dalam menjalankan fungsinya
	Konflik sosial yang ditimbulkan Organisasi Kemasyarakatan	Maraknya aksi premanisme yang dilakukan Organisasi Kemasyarakatan
		Konflik kepengurusan internal organisasi
		Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan

C. Faktor yang menghambat pencapaian pelayanan Perangkat Daerah dalam rangka mendukung program nasional adalah :

- 1. Masih belum ada data yang aktual tentang para pekerja asing dan ormas asing dikarenakan masih di bawah naungan Dirjend Imigrasi dan Kejaksaan sehingga keterbatasan data – data aktual mengenai informasi tersebut di Kota Balikpapan;
- 2. Masih belum di optimalkan peran FPK dan FKDM yang kegiatannya belum sampai ke kelurahan sehingga perlu bersinergi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Balikpapan untuk dilakukan fasilitasi;
- 3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 4 pilar kebangsaan (Pancasila, UUD1946, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika) dilingkungan Masyarakat luas.

Tagging Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Tagging	Pagu Anggaran (RENSTRA 2025-2029) Tahun 2026
			Satuan	Tahun 2026		
8.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	81		9.668.265.168,00
8.01.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	65		9.990.000,00
8.01.1.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	Infrastruktur Pelayanan Publik	9.990.000,00
8.01.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	80,5		5.640.380.196,00
8.01.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	25	Infrastruktur Pelayanan Publik	5.640.380.196,00
8.01.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin	81		46.444.000,00
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Orang	25	Infrastruktur Pelayanan Publik	46.444.000,00
8.01.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	80		1.308.574.366,00
8.01.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	Infrastruktur Pelayanan Publik	252.960.751,00

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Tagging	Pagu Anggaran (RENSTRA 2025-2029) Tahun 2026
			Satuan	Tahun 2026		
8.01.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	11	Infrastruktur Pelayanan Publik	568.399.330,00
8.01.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	Infrastruktur Pelayanan Publik	108.543.885,00
8.01.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	Infrastruktur Pelayanan Publik	12.538.500
8.01.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	10	Infrastruktur Pelayanan Publik	65.131.900,00
8.01.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	Infrastruktur Pelayanan Publik	301.000.000,00
8.01.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Poin	81		156.000.000,00
8.01.1.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	Infrastruktur Pelayanan Publik	156.000.000,00
8.01.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	81		1.201.135.596,00
8.01.1.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	Infrastruktur Pelayanan Publik	291.164.896,00
8.01.1.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	Infrastruktur Pelayanan Publik	909.970.700,00
8.01.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	80		1.305.741.010,00
8.01.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	21	Infrastruktur Pelayanan Publik	565.889.150,00
8.01.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	92	Infrastruktur Pelayanan Publik	365.256.860,00

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Tagging	Pagu Anggaran (RENSTRA 2025-2029) Tahun 2026
			Satuan	Tahun 2026		
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	Infrastruktur Pelayanan Publik	75.993.000,00
8.01.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	Infrastruktur Pelayanan Publik	133.579.530
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pelaksanaan fasilitasi pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	%	66		7.168.415.032,00
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional	%	100		7.168.415.032,00
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	Dokumen	1	SDGs	24.790.000,00
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	Dokumen	1	SDGs	786.511.500,00
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	43	SDGs	1.290.568.676,00

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Tagging	Pagu Anggaran (RENSTRA 2025-2029) Tahun 2026
			Satuan	Tahun 2026		
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	Orang	300	SDGs	185.120.000,00
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	2050	Fungsi Pendidikan	1.318.600.000,00
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	43	Fungsi Pendidikan	3.063.952.856,00
8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	1	Fungsi Pendidikan	498.872.000,00
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN SERTA ETIKA BUDAYA POLITIK	Persentase Fasilitas Pendidikan Politik	%	100		5.013.834.715,00
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik yang diberikan	%	100		5.013.834.715,00

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Tagging	Pagu Anggaran (RENSTRA 2025-2029) Tahun 2026
			Satuan	Tahun 2026		
8.01.03.1.01.01	Penyusunan Program kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun	Dokumen	1	SDGs	25.109.258,00
8.01.03.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun	Dokumen	1	SDGs	2.948.727.482,00
8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	50	SDGs	463.055.440,00

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Tagging	Pagu Anggaran (RENSTRA 2025-2029) Tahun 2026
			Satuan	Tahun 2026		
8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	150	SDGs	214.195.750,00
8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	1	SDGs	1.362.746.785,00
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan	%			2.306.355.115
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase perwakilan ormas yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan ormas	%	100		2.306.355.115
8.01.04.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	SDGs	14.800.000,00

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Tagging	Pagu Anggaran (RENSTRA 2025-2029) Tahun 2026
			Satuan	Tahun 2026		
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	SDGs	214.800.000,00
8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah	Orang	300	SDGs	252.829.760,00
8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	150	SDGs	177.218.720,00
8.01.04.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Laporan	1	SDGs	187.683.200,00
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pemuda yang mengikuti sosialisasi konsep P4GN	%	95		2.097.456.690,00
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase penyelenggaraan sosialisasi konsep P4GN	%	100		2.097.456.690,00

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Tagging	Pagu Anggaran (RENSTRA 2025-2029) Tahun 2026
			Satuan	Tahun 2026		
8.01.05.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	Fungsi Pendidikan	21.876.000,00
8.01.05.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	Fungsi Pendidikan	938.270.850,00
8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	400	Fungsi Pendidikan	216.776.740,00
8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	300	Fungsi Pendidikan	556.300.000,00

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Tagging	Pagu Anggaran (RENSTRA 2025-2029) Tahun 2026
			Satuan	Tahun 2026		
8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	4	Fungsi Pendidikan	364.233.100,00
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Monitoring Potensi Konflik	%			6.113.927.225,00
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase sosialisasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana	%	100		6.113.927.225,00
8.01.06.1.01.01	Penyusunan Program Kerja Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	SDGs	50.000.000,00
8.01.06.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	SDGs	2.574.811.875,00

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Tagging	Pagu Anggaran (RENSTRA 2025-2029) Tahun 2026
			Satuan	Tahun 2026		
8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	40	SDGs	1.061.355.350,00
8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	40	SDGs	264.260.000,00
8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	36	SDGs	349.500.000,00
8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	36	SDGs	1.814.000.000,00
JUMLAH						30.909.230.510,00

2.4.Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja

Tabel T-C.31. Review terhadap Rancangan Renja dan Perubahan Renja Tahun 2025 Badan Kesatuan bangsa dan Kota Balikpapan

Program	Lokasi	Indikator kinerja	Renja Murni		Hasil Analisa Kebutuhan		Penambahan / Pengurangan
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80 Poin	10.481.903.407,00	80 Poin	9.668.265.168,00	(1.112.240.239)
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kota Balikpapan	Persentase pelaksanaan fasilitasi pemahaman masyarakat terhadap 4 konsensus Nasional	64%	8.820.585.100,00	66%	7.168.415.032,00	(1.652.170.068)
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kota Balikpapan	Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	100%	5.686.438.320,00	100%	5.013.834.715,00	(672.603.605)
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kota Balikpapan	Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan yang telah melapor pada Pemerintah Kota Balikpapan	85%	1.663.561.680,00	89%	847.331.680,00	(816.230.000)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kota Balikpapan	Persentase Pemuda yang mengikuti sosialisasi konsep P4GNFasilitasi	92%	2.600.000.000,00	98%	2.097.456.690,00	(502.543.310)

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kota Balikpapan	Persentase Monitoring potensi konflik	88%	6.950.000.000,00	88%	6.113.927.225,00	(836.072.775)
				36.501.090.507,00		30.909.230.510,00	

Tabel T-C.32 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Besaran/ Volume/Target Kinerja Program dan Kegiatan	Catatan
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kota Balikpapan	Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan yang Telah Melaporan pada Pemerintahan Kota Balikpapan	84%	Pemberian Dana Hibah Untuk Organisasi Kemasyarakatan : Hidayatullah
2.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENGANANAN KONFLIK	Kota Balikpapan	Persentase Monitoring Potensi Konflik	84%	Pemberian Dana Hibah Untuk Instansi Vertikal dan FKDM
3	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kota Balikpapan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	66%	Pemberian Hibah untuk FPK dan Instansi Vertikal

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu **“Indonesia Yang Mandiri, Adil dan Makmur** yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2023 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV (2020-2024) Percepatan pembangunan dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritime dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritime.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkpribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan Sembilan agenda prioritas

dalam pemerintahan kedepan, kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA.

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara.
2. Membuat Pemerintahan selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Mempertegas kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengungkapkan lima poin penting untuk bisa mencapai sasaran pembangunan nasional atau rencana kerja pemerintah (RKP) 2025.

1. Sasaran dan prioritas pembangunan RKP 2025 menjadi acuan dan referensi dalam penyusunan RKA K/L dan RKPD.
2. Pentingnya sinergi perencanaan pembangunan antara Renja K/L serta RKPD dengan RKP 2025
3. Perencanaan dan anggaran yang disusun K/L dan pemerintah daerah harus terukur, imperatif dan sesuai dengan amanat presiden “making delivered”, diperkuat melalui mekanisme Clearing House dengan menerapkan prinsip Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).
4. Memperkuat integrasi dan sinergi sumber pendanaan yang mengedepankan paradigma bahwa pemanfaatan pendanaan harus dilakukan dengan urutan prioritas, yaitu pendanaan swasta, KPBU, BUMN, dan APBN sebagai sumber terakhir yang digunakan.
5. K/L dan pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan pelaksanaan Major Project dan didukung sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian yang andal.

Hal-hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2025.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan.

Tujuan dan sasaran merupakan kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan dan sasaran pembangunan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pemerintah.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 :

- 1. Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi
- 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berdaya Saing
- 3. Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan
- 4. Mewujudkan Lingkungan Yang Inklusif dan Berkelanjutan
- 5. Terciptanya Pembangunan Ekonomi Inklusif

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
				(n-2)	(n)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)		
				2020	2022	2023	2024	2025	2026		
	Meningkatnya kapasitas ketahanan bencana dan ketertiban kota		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	0,56	0,8	0,82	0,85	0,86	0,88	0,88	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	n/a	27	28	28	29	30	30	
		Meningkatnya Pembangunan Demokrasi dan Politik di Daerah	Persentase Partisipasi Lembaga Politik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat	n/a	67%	80%	100%	67%	67%	67%	

		Meningkatka nnya Pencegahan Konflik Sosial di Kota Balikpapan	Presentase Konflik Sosial yang tertangani	64,50%	80%	83%	88%	88%	89%	89%
--	--	---	--	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

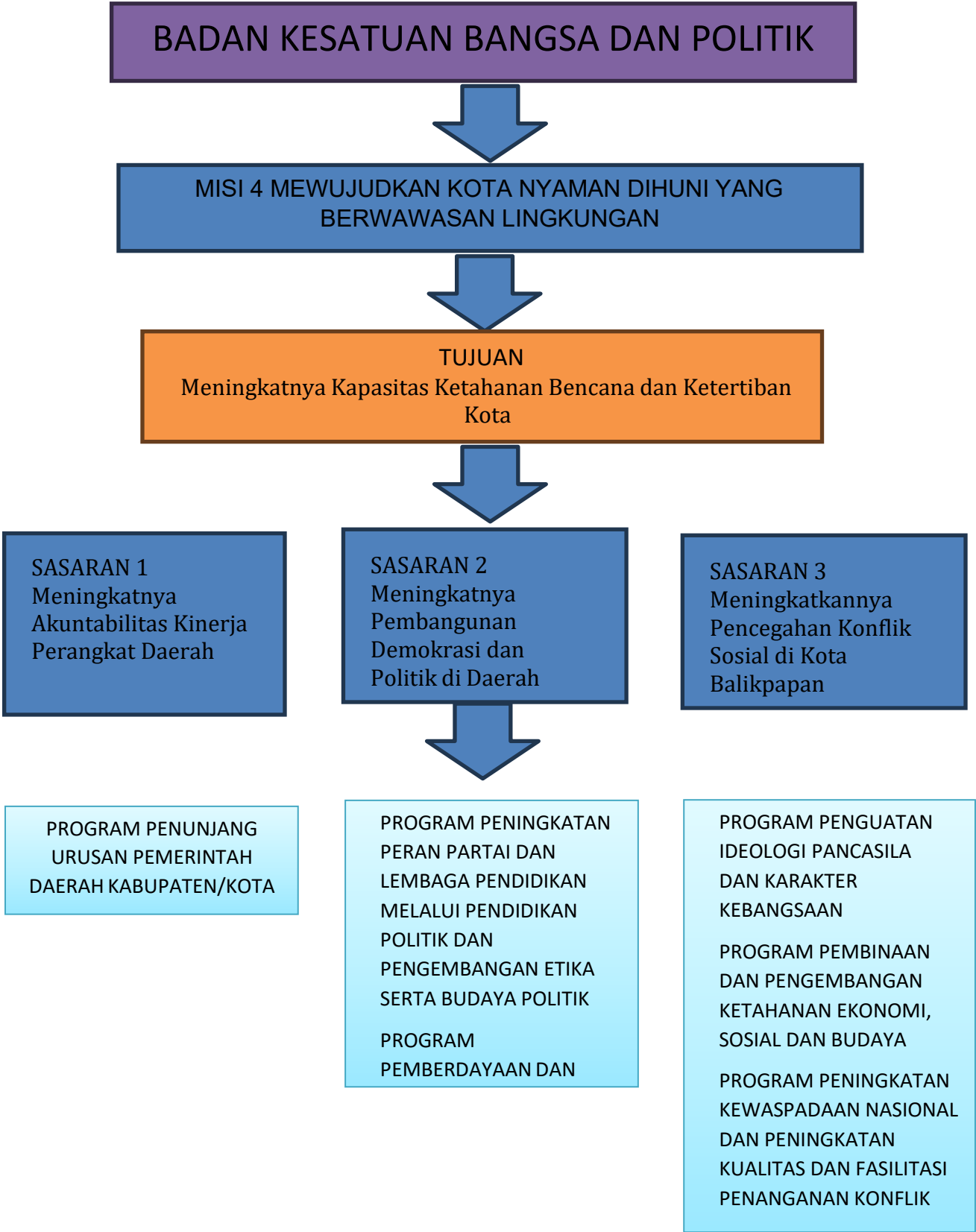
Berdasarkan Visi dan Misi walikota Balikpapan Tahun 2021-2026 maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan mengemban Misi ke 4 Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan,yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan visi dan misi Walikota Balikpapan dan sesuai tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :



Tabel rencana program dan kegiatan Tahun 2025 dan prakiran maju Tahun 2026 digambarkan dengan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C.33.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025																					
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								36.501.090.507,00	34.706.802.763,00	30.909.230.510,00	-5.591.859.997,00							3.533.454.597,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							36.501.090.507,00	34.706.802.763,00	30.909.230.510,00	-5.591.859.997,00							3.533.454.597,00		
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							36.501.090.507,00	34.706.802.763,00	30.909.230.510,00	-5.591.859.997,00							3.533.454.597,00		
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				86	86	10.780.505.407,00	10.463.967.663,00	9.668.265.168,00	-7.262.050.810,00							3.518.454.597,00		
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				68 Poin	68 Poin	9.990.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.990.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				81 Poin	81 Poin	6.804.623.500,00	6.310.335.756,00	5.640.380.196,00	-1.164.243.304,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/b ulan	25 Orang/b ulan	6.804.623.500,00	6.310.335.756,00	5.640.380.196,00	-1.164.243.304,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN SISA BELANJA LAINNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				undefined undefined	81 Poin	49.784.100,00	49.784.100,00	46.444.000,00	-3.340.100,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -	Seluruh Pegawai Badan Kesbangpol Kota Balikpapan		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	49.784.100,00	49.784.100,00	46.444.000,00	-3.340.100,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				81 Poin	81 Poin	1.400.902.461,00	1.378.652.461,00	1.308.574.366,00	-92.328.095,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -	Seluruh Pegawai Badan Kesbangpol Kota Balikpapan		743.249.251,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	6 Paket	252.960.751,00	252.960.751,00	252.960.751,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			252.960.751,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	13 Paket	585.287.825,00	585.287.825,00	568.399.330,00	-16.888.495,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	59.983.485,00	59.983.485,00	108.543.885,00	48.560.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				50 Dokumen	50 Dokumen	12.538.500,00	12.538.500,00	12.538.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			12.538.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan	20 Laporan	65.131.900,00	0,00	0,00	-65.131.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK HOTEL PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				-	20 Laporan	0,00	65.131.900,00	65.131.900,00	65.131.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	- -			75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	15 Laporan	425.000.000,00	402.750.000,00	301.000.000,00	-124.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			402.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				81 Poin	81 Poin	156.000.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -	Seluruh Pegawai Badan Kesbangpol Kota Balikpapan		156.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	156.000.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			156.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				82 Poin	82 Poin	1.053.464.336,00	1.253.464.336,00	1.201.135.596,00	147.671.260,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -	Seluruh Pegawai Badan Kesbangpol Kota Balikpapan		1.253.464.336,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	254.357.636,00	254.357.636,00	291.164.896,00	36.807.260,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBUT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			254.357.636,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	799.106.700,00	999.106.700,00	909.970.700,00	110.864.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			999.106.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				81 Poin	81 Poin	1.305.741.010,00	1.305.741.010,00	1.305.741.010,00	0,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -	Seluruh Pegawai Badan Kesbangpol Kota Balikpapan		1.305.741.010,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				21 Unit	21 Unit	565.889.150,00	565.889.150,00	565.889.150,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			565.889.150,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				68 Unit	92 Unit	365.256.860,00	365.256.860,00	365.256.860,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			365.256.860,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	75.993.000,00	75.993.000,00	75.993.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			75.993.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	298.602.000,00	298.602.000,00	298.602.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			298.602.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	NON URUSAN							36.501.090.507,00	34.706.802.763,00	30.909.230.510,00	-5.591.859.997,00							3.533.454.597,00		
	8.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							36.501.090.507,00	34.706.802.763,00	30.909.230.510,00	-5.591.859.997,00							3.533.454.597,00		
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							36.501.090.507,00	34.706.802.763,00	30.909.230.510,00	-5.591.859.997,00							3.533.454.597,00		
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							36.501.090.507,00	34.706.802.763,00	30.909.230.510,00	-5.591.859.997,00							3.533.454.597,00		
1.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pelaksanaan Fasilitas Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional				66 %	66 %	8.820.585.100,00	8.252.635.100,00	7.168.415.032,00	-8.820.585.100,00							0,00		
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional				100 %	100 %	8.820.585.100,00	8.252.635.100,00	7.168.415.032,00	-1.652.170.068,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																			
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	25.012.000,00	25.012.000,00	24.790.000,00	-222.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																			
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.300.000.000,00	1.125.000.000,00	786.511.500,00	-513.488.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				43 Orang	43 Orang	1.250.000.000,00	1.180.000.000,00	1.290.568.676,00	40.568.676,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				300 Orang	300 Orang	750.000.000,00	500.000.000,00	185.120.000,00	-564.880.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				4 Laporan	0 Laporan	150.000.000,00	120.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				2050 Keluarga	2050 Keluarga	1.750.000.000,00	1.707.050.000,00	1.318.600.000,00	-431.400.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				43 Orang	43 Orang	3.089.803.200,00	3.089.803.200,00	3.063.952.856,00	-25.850.344,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	1 Dokumen	505.769.900,00	505.769.900,00	498.872.000,00	-6.897.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Fasilitas Pendidikan Politik				100 %	100 %	5.686.438.320,00	5.397.638.320,00	5.013.834.715,00	-5.671.438.320,00							15.000.000,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik yang diberikan				100 %	100 %	5.686.438.320,00	5.397.638.320,00	5.013.834.715,00	-672.603.605,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	25.109.258,00	25.109.258,00	25.109.258,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	3.179.487.482,00	3.179.487.482,00	2.948.727.482,00	-230.760.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				50 Orang	50 Orang	477.457.440,00	477.457.440,00	463.055.440,00	-14.402.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				150 Orang	150 Orang	361.100.000,00	261.100.000,00	214.195.750,00	-146.904.250,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.643.284.140,00	1.454.484.140,00	1.362.746.785,00	-280.537.355,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.04	PROGRAM PERBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan				89 %	89 %	1.663.561.680,00	1.563.561.680,00	847.331.680,00	-1.663.561.680,00							0,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase perwakilan ormas yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan ormas				100 %	100 %	1.663.561.680,00	1.563.561.680,00	847.331.680,00	-816.230.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Organisasi Kemasyarakatan		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	14.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	214.800.000,00	214.800.000,00	214.800.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				300 Orang	300 Orang	922.809.760,00	922.809.760,00	252.829.760,00	-669.980.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				150 Orang	150 Orang	323.468.720,00	223.468.720,00	177.218.720,00	-146.250.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	187.683.200,00	187.683.200,00	187.683.200,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pemuda yang Mengikuti Sosialisasi Konsep P4GN				-	95 %	2.600.000.000,00	2.430.000.000,00	2.097.456.690,00	-2.600.000.000,00							0,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase penyelenggaraan sosialisasi konsep P4GN				-	100 %	2.600.000.000,00	2.430.000.000,00	2.097.456.690,00	-502.543.310,00			-	- -	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	21.876.000,00	-28.124.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	938.270.850,00	-61.729.150,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				400 Orang	200 Orang	500.000.000,00	470.000.000,00	216.776.740,00	-283.223.260,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				300 Orang	300 Orang	550.000.000,00	550.000.000,00	556.300.000,00	6.300.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																					
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				48 Laporan	48 Laporan	500.000.000,00	360.000.000,00	364.233.100,00	-135.766.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
5.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik yang telah Dilakukan Monitoring				88 %	88 %	6.950.000.000,00	6.599.000.000,00	6.113.927.225,00	-6.950.000.000,00							0,00				
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase sosialisasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana				100 %	100 %	6.950.000.000,00	6.599.000.000,00	6.113.927.225,00	-836.072.775,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																					
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																					
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	2.650.000.000,00	2.650.000.000,00	2.574.811.875,00	-75.188.125,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																					
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				40 Orang	50 Orang	1.500.000.000,00	1.450.000.000,00	1.061.355.350,00	-438.644.650,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																					
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				40 Orang	40 Orang	500.000.000,00	349.500.000,00	264.260.000,00	-235.740.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																					
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				36 Laporan	36 Laporan	500.000.000,00	349.500.000,00	349.500.000,00	-150.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																					
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				36 Dokumen	36 Dokumen	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	1.814.000.000,00	64.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
		J U M L A H																				3.533.454.597,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan yaitu meningkatnya kapasitas ketahanan bencana dan ketertiban kota.

Pada tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan akan melaksanakan **6 program** dengan jumlah kegiatan sebanyak **11 kegiatan** dan **42 Sub Kegiatan** yang merupakan implementasi dari tujuan renstra 2021-2026 Meningkatnya kapasitas ketahanan bencana dan ketertiban kota. Lokasi kegiatan keseluruhan dilaksanakan di Kota Balikpapan. Untuk melaksanakan seluruh program kegiatan sub kegiatan tersebut dengan pagu indikatif sebesar **Rp. 30.909.230.510,00,-** yang bersumber dari APBD-P Kota Balikpapan Tahun 2025. Program tersebut terdiri dari:

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Renja Perubahan
			Satuan	Tahun 2025	
8.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	81	9.668.265.168,00
8.01.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	65	9.990.000,00
8.01.1.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	9.990.000,00
8.01.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	80,5	5.640.380.196,00
8.01.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	25	5.640.380.196,00
8.01.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin	81	46.444.000,00
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Orang	25	46.444.000,00
8.01.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	80	1.308.574.366,00

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Renja Perubahan
			Satuan	Tahun 2025	
8.01.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	252.960.751,00
8.01.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Paket	11	568.399.330,00
8.01.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	108.543.885,00
8.01.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	12.538.500
8.01.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	10	65.131.900,00
8.01.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	301.000.000,00
8.01.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Poin	81	156.000.000,00
8.01.1.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	156.000.000,00
8.01.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	81	1.201.135.596,00
8.01.1.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	291.164.896,00
8.01.1.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	909.970.700,00
8.01.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	80	1.305.741.010,00
8.01.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	21	565.889.150,00

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Renja Perubahan
			Satuan	Tahun 2025	
8.01.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	92	365.256.860,00
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Unit	1	75.993.000,00
8.01.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	133.579.530
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pelaksanaan fasilitasi pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	%	66	7.168.415.032,00
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional	%	100	7.168.415.032,00
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	Dokumen	1	24.790.000,00
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	Dokumen	1	786.511.500,00
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	43	1.290.568.676,00

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Renja Perubahan
			Satuan	Tahun 2025	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	Orang	300	185.120.000,00
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	2050	1.318.600.000,00
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	43	3.063.952.856,00
8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	1	498.872.000,00
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN SERTA ETIKA BUDAYA POLITIK	Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	%	100	5.013.834.715,00
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik yang diberikan	%	100	5.013.834.715,00

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Renja Perubahan
			Satuan	Tahun 2025	
8.01.03.1.01.01	Penyusunan Program kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun	Dokumen	1	25.109.258,00
8.01.03.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun	Dokumen	1	2.948.727.482,00
8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	50	463.055.440,00

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Renja Perubahan
			Satuan	Tahun 2025	
8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	150	214.195.750,00
8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	1	1.362.746.785,00
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan	%		2.306.355.115
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase perwakilan ormas yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan ormas	%	100	2.306.355.115
8.01.04.1.01.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	14.800.000,00

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Renja Perubahan
			Satuan	Tahun 2025	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	214.800.000,00
8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah	Orang	300	252.829.760,00
8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	150	177.218.720,00
8.01.04.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Laporan	1	187.683.200,00
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pemuda yang mengikuti sosialisasi konsep P4GN	%	95	2.097.456.690,00
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase penyelenggaraan sosialisasi konsep P4GN	%	100	2.097.456.690,00

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Renja Perubahan
			Satuan	Tahun 2025	
8.01.05.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	21.876.000,00
8.01.05.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	938.270.850,00
8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	400	216.776.740,00
8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	300	556.300.000,00

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Renja Perubahan
			Satuan	Tahun 2025	
8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	4	364.233.100,00
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Monitoring Potensi Konflik	%		6.113.927.225,00
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase sosialisasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana	%	100	6.113.927.225,00
8.01.06.1.01.01	Penyusunan Program Kerja Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	50.000.000,00
8.01.06.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	2.574.811.875,00

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Renja Perubahan
			Satuan	Tahun 2025	
8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	40	1.061.355.350,00
8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	40	264.260.000,00
8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	36	349.500.000,00
8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	36	1.814.000.000,00
JUMLAH					30.909.230.510,00

Dalam rangka meningkatkan kualitas Renja dan kualitas pembangunan serta keselarasan dengan inovasi OPD yang akan dicantumkan dalam RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025 maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Balikpapan telah memiliki beberapa inovasi yang telah berjalan dan sedang berlangsung di tahun 2025, yaitu sebagai berikut :

No.	Uraian/Nama Inovasi	Pengampu	Keterangan
1.	SIPERKASA (Sistem Perhitungan dan Rekapitulasi Suara untuk mempermudah perhitungan Kotak Suara Pada Pemilu Kada) https://siperkasa.balikpapan.go.id/	Bidang Politik Dalam Negeri dan organisasi Kemasyarakatan	Pengadaan Tahun 2019
2.	PERWIRA (Sistem Peta Kerawanan Wilayah Daerah untuk menghimpun data rawan konflik dan informasi bencana) http://pewirabalikpapan.inotive.go.id/	Bidang Wawasan Kebangsaan	Pengadaan Tahun 2022
3.	PR CAK BIMO (Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Bidang Melalui ON LINE) http://prcakbimo.balikpapan.go.id/	Keuangan	Pengadaan Tahun 2021
4.	Satu Ormas (Sistem Layanan Terpadu Organisasi Kemasyarakatan) http://satuormas.balikpapan.go.id/	Bidang Politik Dalam Negeri dan organisasi Kemasyarakatan	Pengadaan Tahun 2022

BAB V

PENUTUP

5.1. CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RENJA

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2026 dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- c. Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025–2029;
- d. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025–2029.

Adapun catatan penting yang menjadi landasan dan pertimbangan dalam penyusunan Renja ini adalah sebagai berikut:

1. Keselarasan Perencanaan

Renja Badan Kesbangpol Tahun 2026 disusun dengan menjamin konsistensi antara visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, serta kebijakan nasional dan provinsi yang relevan;

2. Pendekatan Partisipatif dan Inklusif

Penyusunan Renja melibatkan masukan dari pemangku kepentingan, baik internal perangkat daerah maupun eksternal, melalui Musrenbang, forum perangkat daerah, konsultasi publik, dan koordinasi lintas sektor, untuk memastikan program dan kegiatan yang direncanakan menjawab kebutuhan masyarakat;

3. Berbasis Data dan Evaluasi Kinerja

Perumusan program dan kegiatan mengacu pada data terkini, hasil pengukuran kinerja tahun sebelumnya, evaluasi capaian indikator, serta analisis terhadap isu strategis bidang politik, demokrasi, ideologi, ketahanan bangsa, dan kerukunan umat beragama;

4. Responsif terhadap Perubahan Lingkungan Strategis

Perencanaan memperhatikan dinamika politik, keamanan, sosial budaya, serta perkembangan regulasi dan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, yang berpotensi mempengaruhi pencapaian sasaran kinerja;

5. Optimalisasi Sumber Daya

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran, SDM, dan sarana prasarana, penetapan program dan kegiatan dilakukan dengan pendekatan prioritas, mengutamakan efektivitas dan efisiensi, serta mendukung pencapaian target kinerja daerah.

Dengan mempertimbangkan catatan-catatan tersebut, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2026 diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, guna mendukung terwujudnya stabilitas politik, peningkatan kualitas demokrasi, dan penguatan wawasan kebangsaan di Kota Balikpapan.

1.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2026 akan mengacu pada kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1) Kepatuhan terhadap Regulasi

Seluruh program dan kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman teknis, serta ketentuan administrasi keuangan daerah yang berlaku;

2) Efektivitas dan Efisiensi

Pelaksanaan Program dan Kegiatan diupayakan untuk mencapai sasaran kinerja secara optimal dengan menggunakan sumber daya secara hemat, cermat, dan tepat sasaran;

3) Akuntabilitas dan Transparansi

Setiap tahapan pelaksanaan program dan kegiatan wajib dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif, teknis, maupun keuangan, serta terbuka untuk diawasi oleh pihak yang berwenang;

4) Partisipasi dan Kolaborasi

Mendorong keterlibatan aktif pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan, dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan;

5) Adaptif terhadap perubahan

Pelaksanaan kegiatan harus mampu menyesuaikan terhadap dinamika lingkungan strategis, perubahan kebijakan, kondisi sosial politik, dengan tetap menjaga arah pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan berpedoman pada kaidah-kaidah tersebut, diharapkan pelaksanaan Renja Tahun 2026 dapat berjalan efektif, efisien, akuntabel, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kota Balikpapan.

Demikian kami sampaikan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2026 ini kami susun sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, Agustus 2025

KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KOTA
BALIKPAPAN

SUTADI